

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengangguran, ketimpangan sosial dan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius diberbagai negara salah satunya di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi penghambat pembangunan daerah hal ini karena dengan adanya pengangguran dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan sosial. Di negara berkembang cenderung memiliki pendapatan perkapita yang tergolong rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan rendahnya indeks pembangunan manusia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini pemerintah Indonesia masih terus menerus mengupayakan penyelesaian masalah tersebut.

Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Jumu'ah Ayat 10 menjelaskan tentang betapa pentingnya seorang muslim untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

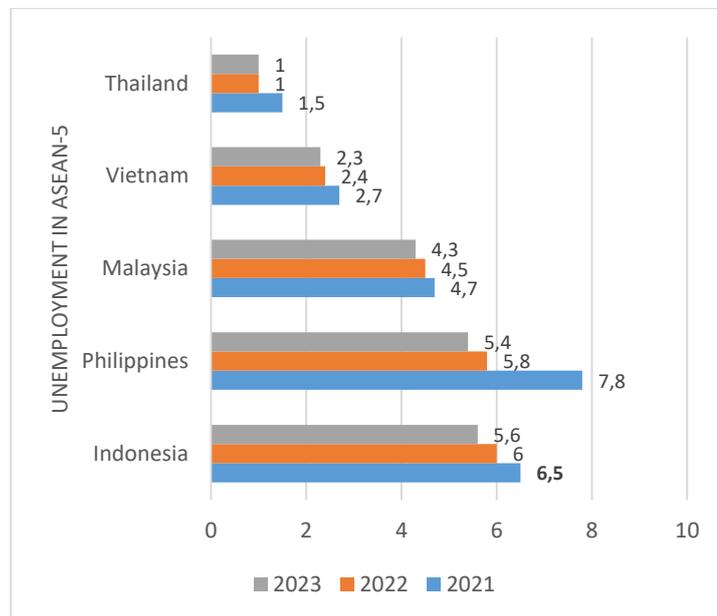
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Dari ayat diatas islam mendorong umatnya untuk berkreaitif mencari potensi sumber daya yang ada didalam dirinya dan dari lingkungan sekitarnya sehingga dapat dikelola menjadi sumber utama perekonomian, namun tentunya harus selalu melibatkan Allah Swt dalam prosesnya untuk meringankan seseorang

dalam mencari pekerjaan tentunya pemerintah harus bertindak untuk mengurangi pengangguran salah satunya dengan memanfaatkan sumber dana desa yang dialokasikan harus tepat dan efisien dan memantau indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil dari *Organization Internasional Labour* (2022), menemukan secara global tingkat pengangguran tahun 2022 diproyeksikan mencapai 207 juta jiwa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengangguran global tahun 2019 sebesar 187 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja global 2022 diperkirakan tetap sebesar 1,2 poin memperoleh persentase yang tinggi dari tahun 2019 dan diproyeksikan akan berlanjut sampai 2023.



Sumber: *World Economic Outlook (International Monetary Fund) April 2022*

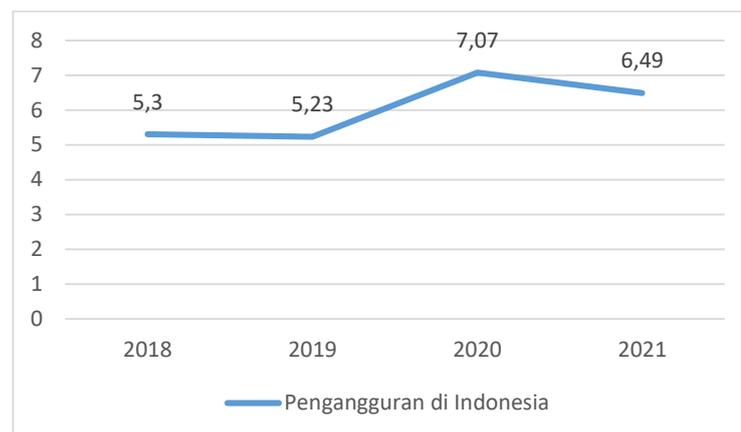
GAMBAR 1.1.
Proyeksi Tingkat Pengangguran 5 Negara ASEAN
Tahun 2021-2023

Menurut data di atas hasil proyeksi *International Monetary Fund* terhadap 5 negara ASEAN menemukan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,00% dilanjutkan dengan negara Philippina sebesar 5,8% dan diproyeksikan Indonesia mengalami penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2023 menjadi 5,6% tetapi negara Indonesia diproyeksikan masih menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara 5 negara ASEAN.

Menurut berita yang diterbitkan di website Pusat Studi Perdagangan Dunia, UGM, 21 Oktober 2022 menyatakan peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut. Bahkan, firma riset investasi Ned Davis Research memprediksi bahwa terdapat 98,1% kemungkinan resesi terjadi pada tahun 2023 dan Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara yang terkena dampak resesi 2023. Sehingga dari adanya fenomena/isu tersebut akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia pengangguran adalah masalah yang cukup serius dibandingkan dengan masalah perubahan dari distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan bagi penduduk yang memiliki pendapatan rendah, oleh karena hal tersebut masalah pengangguran yang dihadapi negara berkembang tiap tahunnya semakin bertambah serius.

Pada tahun 2021 penduduk Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,22% dibandingkan dengan Agustus 2020 sampai Maret 2021, dicatat pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 273 juta jiwa (BPS Indonesia, 2021). Peningkatan jumlah penduduk ini disertai dengan peningkatan jumlah pengangguran tahun 2020 menjadi 7% dari 5,2%. Hal ini sesuai dengan penelitian Indayani dan Hartono (2020) yang menemukan bahwa penyebab dari bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia salah satunya dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk.

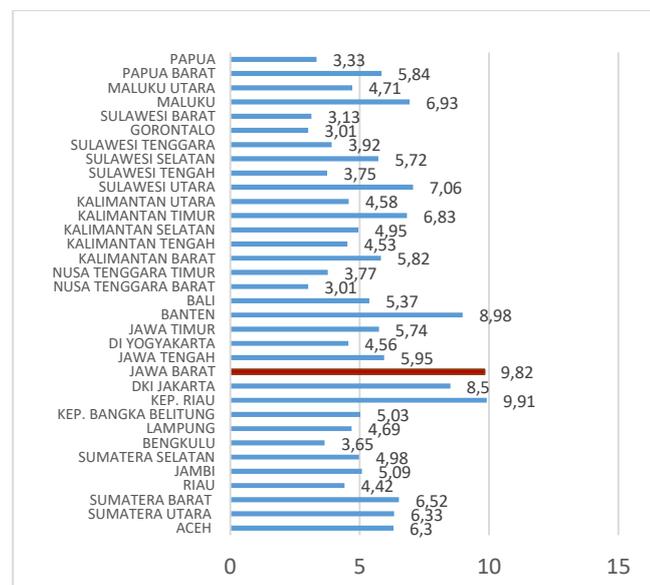


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (Data Diolah)

GAMBAR 1.2.
Persentase Tingkat Pengangguran Di Indonesia
Tahun 2018-2021

Berdasarkan data pada Gambar 1.2. yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 7,07% meningkat sebesar 35,18% dari tahun 2019 dan mengalami penurunan 8,20% menjadi 6,49% pada tahun 2021 namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dan 2019 tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 masih tergolong

tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang sedang dalam tahapan pemulihan ekonomi pasca adanya covid-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya yang menyebabkan terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian. Tahun 2021 pemerintah Indonesia terus mengencangkan program pemulihan ekonomi nasional sampai tahun 2022.



Sumber: BPS Diolah

GAMBAR 1.3.
Persentase Pengangguran di Provinsi Indonesia
Tahun 2021

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi tingkat pengangguran di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Menurut data BPS Indonesia (2021), pada Gambar 1.3 Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua tingkat pengangguran tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan belum tercapainya target pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat secara maksimal.

Melihat dari populasi penduduk di Jawa Barat tentunya kucuran dana desa yang dibagikan oleh pemerintah tidaklah sedikit. Jawa barat adalah salah satu provinsi yang menerima pengalokasian dana desa dari pihak pemerintah pusat. Menurut data dari Dirjen Perimbangan Keuangan total dana desa tahun 2018 mencapai Rp.4,79 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2021 dana desa yang diterima mencapai Rp.5,99 triliun.

TABEL 1.1.
Jumlah Dana Desa Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

TAHUN	JUMLAH DANA DESA (Rupiah)	TOTAL DESA PENERIMA DANA
2018	Rp. 4.794.956.234.000	5312
2019	Rp. 5.710.074.613.000	5312
2020	Rp. 5.940.216.905.000	5312
2021	Rp. 5.990.622.942.000	5312

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Beberapa program yang sudah dilakukan presiden yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui pemanfaatan dana desa salah satunya program *cash for work*/program padat karya yaitu dengan skema pemberian upah langsung secara tunai kepada semua tenaga kerja yang ikut terlibat, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkannya pertumbuhan ekonomi dengan adanya program tersebut terbukti bahwa dana desa memiliki peran yang bermanfaat dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Pemerintah mengharapkan dengan adanya dana desa dapat meningkatkan dan menjadikan lebih baiknya pembangunan di daerah karena alokasi yang diberikan pemerintah kepada desa dapat digunakan untuk biaya pemberdayaan

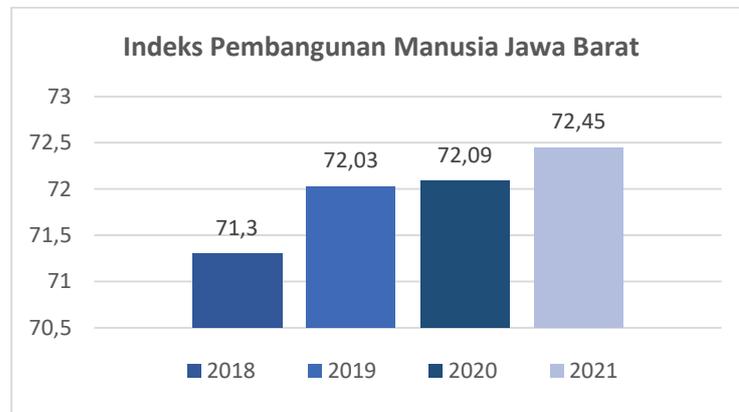
dan pembangunan modal desa. Kucuran dana desa yang tidak sedikit sehingga berpotensi besar terhadap penyimpangan dan ketidaksesuaian penggunaan dananya.

Dalam hal pencapaian atas dana desa masih memerlukan beberapa penyempurnaan, diantaranya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawalan/pengawasan dana desa. Pemerintah saat ini senantiasa berusaha agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan berpihak kepada masyarakat miskin terutama saat pandemik yang melanda Indonesia hingga saat ini. Selain itu agar regulasi yang sudah pemerintah susun dapat memperoleh hasil pengelolaan dana desa yang akuntabilitas, efektif dan efisien, sehingga tujuan pengalokasian dana desa dapat tercapai melalui tujuan yang diinginkan pemerintah dan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan acuan untuk mengukur dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia ini berguna untuk mengukur tingkat suatu negara apakah termasuk negara maju, berkembang atau terbelakang, dan juga untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi atas kualitas hidup masyarakat di suatu negara.

Nilai dari indeks pembangunan manusia dapat menunjukkan apakah suatu negara atau wilayah telah mencapai target yang telah ditentukan berupa pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat, angka harapan hidup, dan juga telah tercapainya standar hidup masyarakat yang layak yang dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran. Di negara Indonesia, indeks pembangunan manusia

dijadikan dasar penentuan dana transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum yang diserahkan untuk kabupaten/kota.



Sumber: BPS Diolah

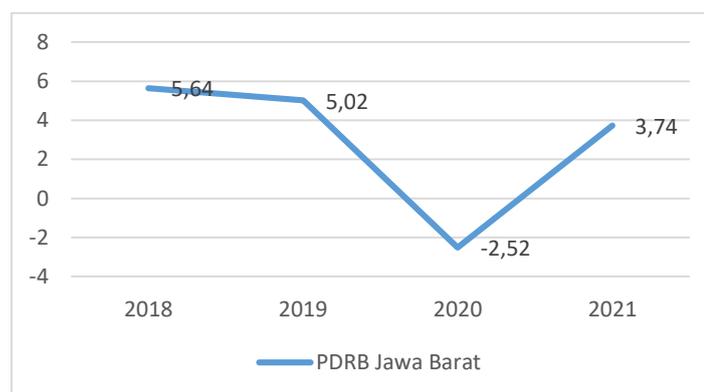
GAMBAR 1.4.
Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Barat

Pembangunan manusia memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia di suatu negara maupun daerah maka semakin baik juga tingkat pertumbuhannya yang biasanya ditandai dengan pengurangan tingkat kemiskinan daerah tersebut (Sihite, 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi acuan dan tolak ukur suatu daerah terhadap perkembangan perekonomiannya.

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah dimana semakin tingginya angka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka tingkat pengangguran akan semakin berkurang, hal ini sesuai dengan penelitian Irawan (2022), yang menjelaskan bahwa ketika meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan terjadi penurunan pengangguran sebesar 0,018%. Hasil penelitian tersebut memiliki kesesuaian dengan teori

hukum okun yang menjelaskan ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi 2% maka akan terjadi penurunan tingkat pengangguran lebih dari 1%. Dengan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi maka akan lebih banyak menghasilkan output, dengan begitu tenaga kerja dapat terserap dan angka pengangguran berkurang.

PDRB konstan ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh harga. Adanya perhitungan yang didasari dengan harga konstan ini berguna bagi perencanaan ekonomi, untuk proyeksi dan menilai pertumbuhan ekonomi secara sektoral maupun keseluruhan (BPS Indonesia, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

GAMBAR 1.5.
 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat
 Berdasarkan PDRB Harga Konstan 2010

Dilihat dari data pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan Provinsi Jawa Barat diatas pada tahun 2018-2021 bahwa terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 mencapai -2,52 hal ini berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran yang tinggi pada tahun 2020. Ini menandakan pertumbuhan

ekonomi yang tidak stabil pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat dan membaiknya perekonomian tahun 2021 sebesar 3,74% menyebabkan penurunan tingkat pengangguran di Jawa Barat.

Penelitian tentang Pengangguran ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam penelitian Oktavia (2019), variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat artinya terjadinya peningkatan pada jumlah dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya membawa perubahan yang cukup baik dalam meningkatkan kesempatan kerja di wilayah pedesaan di Provinsi Kalimantan Barat terjadinya peningkatan pada jumlah kucuran dana desa dapat memperluas kesempatan kerja di desa, hal tersebut sejalan dengan penelitian Putro (2021), namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Navis (2019) menemukan bahwa dana desa bidang pembangunan berpengaruh positif terhadap penurunan angka pengangguran. Artinya apabila pengalokasian dana desa untuk pembangunan naik sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran sebesar 0,406 satuan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Soekapdjo dan Oktavia (2021) dan Suryaningtyas (2021) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia akan menurunkan pengangguran di Indonesia dan sebaliknya, menurunnya indeks pembangunan manusia akan meningkatkan pengangguran. Namun penelitian tersebut bertolak belakang pada penelitian Palindangan dan Bakar (2021) indeks pembangunan manusia

berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terletak di Kabupaten Mimika, bahkan menurut Kuswiyati dan Utomo (2022) indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Dalam penelitian Marlina (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Adiyadnya dan Swara (2021) bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Nuzulaili (2022) bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2017–2020. Bahkan menurut Yani Rizal., dkk., (2021) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian diatas terjadi ketidak konsistenan terhadap hasil penelitian tentang pengangguran, adanya hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel dana desa, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Saptanno dan Kezia Maatoke (2022) yang menganalisis tentang pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Maluku, periode 2017–2020. Perbedaan dengan peneliti ini adalah dengan menambahkan variabel baru yaitu variabel dana desa, dari segi lokasi penelitiannya penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dan penelitian ini menambahkan Teori Keynes sebagai pendukung penelitian.

Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin meneliti dengan judul “**Analisis Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Periode 2018-2021)**”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Didasarkan dari latar belakang yang sudah dijabarkan oleh peneliti diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dana desa berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ?
2. Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah dana desa berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan pembelajaran sehingga dapat menambah wawasan dan pembelajaran tentang pengaruh dana desa, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan analisis bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan dana desa, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran khususnya bagi pemerintah di Jawa Barat.

b. Bagi Desa

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan analisis untuk aparat desa dalam menangani dan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dana untuk mengatasi pengangguran, dan juga agar aparat desa bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk pengembangan

sumber daya manusia dan meninjau perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi pengangguran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan masyarakat dan diharapkan mampu membantu bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengalokasian dana desa pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran yang ada di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.